

BAGAIMANA MASYARAKAT ADAT HARUKU MERANCANG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN?



GLOBAL ADVOCACY TEAM



INTERNATIONAL
ACCOUNTABILITY PROJECT

Rencana pembangunan yang dipimpin oleh komunitas ini merupakan bagian dari rangkaian terobosan yang dibuat oleh masyarakat Haruku di Indonesia bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku, bekerja sama dengan inisiatif Tim Advokasi Global yang difasilitasi oleh International Accountability Project.

Inisiatif ini menyatukan para penggerak komunitas inspiratif dari seluruh dunia untuk melakukan riset yang dipimpin oleh komunitas, melibatkan 945 orang dari 7 negara. Melalui proses pembelajaran bersama dan rancangan bersama, perjalanan selama tiga tahun ini telah menghasilkan serangkaian rencana pembangunan transformatif yang dipimpin oleh komunitas, berfokus pada solusi akar rumput yang bermuara pada solusi di tingkat global.

Baca lebih jauh 7 rencana pembangunan yang dipimpin oleh komunitas untuk melihat berbagai solusi yang diinisiasi oleh masyarakat.

Pelajari lebih lanjut di sini: <https://accountabilityproject.org/work/global-advocacy-team/communities-leading-the-way-inspiring-community-led-development-plans/>

Penulis

Haruku Community, Indonesia, Lenny Patty, and Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku

Penyunting:

Shauna Curphey

Pembuat Ilustrasi:

Haris Ichwan

Perancang Tata Letak:

Carlo Manalansan

Kontributor Foto:

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Maluku

Daftar Isi

Siapa Kami	1
Dimana Kami Tinggal?	1
Sejarah, Budaya, dan Identitas Kami	1
 Apa yang Kami Maksud dengan	
Pembangunan?	7
Hak Kami atas Pembangunan	7
Prinsip-Prinsip Praktik Masyarakat Kami	7
 Prioritas Pengembangan Masyarakat Kami	8
Tantangan Utama yang Kami Hadapi dan	
Prioritas Masalah yang Perlu Diatasi	8
Visi Pengembangan Kami	9
 Partisipasi Masyarakat dalam Merancang	
dan Melaksanakan Rencana Pembangunan	10
Peran dan Partisipasi Kami dalam Menyusun	
Rencana Pembangunan yang Dipimpin oleh	
Masyarakat	10
Proses Konsultasi dan Pemberian Persetujuan	
yang Berkelanjutan di Komunitas Kami	10
 Apa yang Kami Minta	10

Siapa Kami

Dimana Kami Tinggal?

Saya Martha Magdalena Patty, lebih dikenal dengan nama Lenny Patty, seorang pengorganisir masyarakat adat di Maluku, Indonesia. Saat ini saya menjabat sebagai Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Maluku. AMAN bekerja untuk advokasi terkait reformasi agraria, lingkungan dan perubahan iklim, hak menentukan nasib sendiri bagi Masyarakat Adat, dan hak asasi manusia. Saat ini saya memimpin koordinasi inisiatif Global Advocacy Team (GAT) di Negeri Haruku bersama tim saya. Kami bangga menjadi bagian dari GAT yang meletakkan dasar bagi pelaksanaan penelitian berbasis masyarakat dan perencanaan pembangunan berbasis masyarakat.

Sejarah, Budaya, dan Identitas Kami

Sebagian besar penduduk di Provinsi Maluku berasal dari Pulau Seram. Oleh karena itu, Pulau Seram disebut sebagai Nusa Ina atau Pulau Ibu. Konon, dahulu kala hiduplah seorang raja di Nunu Saku yang berlokasi di Pulau Seram. Raja tersebut memiliki dua orang putra yang saling berebut mahkota kerajaan. Untuk mencegah terjadinya perang antar saudara, kedua anak tersebut pergi ke Pulau Haruku bersama para pengikutnya. Mereka hidup terpisah satu sama lain. Konon, pengikut putra sulung dikenal sebagai Patasiwa, atau "Sembilan Orang", sedangkan pengikut putra bungsu disebut Patalima, atau "Lima Orang". Perbedaan ini tercermin dalam simbolisme di rumah tradisional mereka, yang dikenal sebagai balileo. Sebelum kedatangan agama yang terorganisasi, Patasiwa membangun baileo mereka di atas panggung, sementara Patalima membangun baileo mereka langsung di atas tanah.





Di masa lalu, masyarakat adat Haruku hidup dan mencari makan dengan berburu dan bertani di pegunungan di pulau ini. Salah satu kelompok Patalima mendiami daerah pegunungan yang kami sebut sebagai Negeri Lama. Kelompok ini membentuk enam (6) aman (desa), yaitu:

- Aman Huing di bagian selatan wilayah tersebut;
- Aman Hendatu, yang merupakan kampung orang pertama;
- Aman Heratu sebagai tempat kedudukan raja;
- Aman Nuwei, yang berarti "desa di bawah;"
- Aman Kupau, yang merupakan tempat pertemuan dan situs peninggalan leluhur; dan
- Aman Hatu, atau desa di atas batu

Pada masa itu, terjadi perang yang menyebabkan Aman Hendatu berpindah dan menjadi Aman Toumoi, untuk mengawasi wilayah perbatasan.

Di masa lalu, masyarakat di Maluku sering berkumpul untuk mendiskusikan batas-batas wilayah dan konflik antarsuku. Salah satu hasil penting dari diskusi-diskusi ini adalah perjanjian Sou Pata Totu antara Klan Latuharhary dari Haruku dan Klan Tahya dari Sameth. Perjanjian ini, yang dilambangkan dengan lagu "Sopa Mia O," yang dinyanyikan pada upacara pelantikan pemimpin dan rumah adat (hongkotu dan bumbungan baileo) di kedua komunitas, mencerminkan persekutuan yang kuat di antara mereka.

Perjanjian Sou Pata Totu meresmikan komitmen mereka untuk saling membantu selama masa perang. Perjanjian ini menetapkan bahwa Klan Tahya akan membantu pembangunan hongkotu dan baileo Haruku, dan sebaliknya. Perjanjian ini memupuk hubungan yang mendalam antara dua komunitas yang bertetangga ini, yang memiliki keyakinan yang sama dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan. Ikatan abadi ini tercermin dalam pepatah lama, "Haruku ke Laut Sameth ke Laut, Haruku ke Darat Sameth ke Darat," yang masih digunakan untuk menyelesaikan perselisihan antara kedua desa. Pepatah ini menekankan keterkaitan dan takdir bersama mereka, mengingatkan mereka bahwa mereka terikat oleh daratan dan lautan.

Pada abad ke-16, penjelajah Portugis tiba di sebuah pulau untuk mencari rempah-rempah dan kolonisasi. Berlayar di sepanjang pantai selatan, mereka mendarat di Negeri Ama, yang juga dikenal sebagai Negeri Oma. Menurut legenda, nama ini berasal dari pertemuan Portugis dengan seorang pria tua pada saat kedatangan mereka. Itulah alasan mengapa mereka menyebut pulau ini sebagai Nusa Ama (Ama berarti "tua" dalam beberapa bahasa lokal). Bangsa Portugis kemudian membaptis penduduk pulau ini.

Ama, yang menghadap ke Laut Banda, memiliki ciri khas perairan yang dalam dan ombak yang kuat. Konon, saat terjadi badai dahsyat, jangkar kapal Portugis patah dan hilang terbawa arus. Kejadian ini menyebabkan pulau ini disebut sebagai "Pulau Limbah Besi". Bangsa Portugis kemudian melanjutkan perjalanan mereka di sepanjang pantai untuk mencari pelabuhan yang lebih aman. Akhirnya, mereka menemukan sebuah daerah pantai dengan kontur yang landai, yang juga menyediakan tempat berlabuh yang lebih aman. Lokasi baru ini kemungkinan besar menjadi basis yang lebih permanen untuk kegiatan mereka di pulau itu.





Saat mendarat di lokasi yang lebih aman ini, Kapten Viktor dari Portugis dikejutkan oleh pemandangan banyak pohon berbunga yang berjajar di pantai. Penduduk setempat kemudian memberitahunya bahwa pohon-pohon itu disebut haru-ukui, yang berarti “pohon baru” atau “pohon waru”. Sejak saat itu, pulau ini dikenal sebagai Pulau Haruku.

Portugis kemudian membangun Benteng Selandia di Pulau Haruku, dengan melibatkan penduduk setempat dalam pembangunannya. Untuk mengkonsolidasikan kontrol mereka, mereka merelokasi penduduk yang tinggal di daerah pegunungan ke daerah pesisir dekat benteng. Daerah yang baru dihuni ini diberi nama Aman Haru-Ukui. Dalam budaya Maluku, setiap negeri memiliki nama lokal yang disebut Teong Negeri. Oleh karena itu, daerah yang baru dihuni ini juga dikenal sebagai Teong Negeri Pelasona Nanuroko, yang kemudian berkembang menjadi “Negeri Haruku.” Langkah strategis Portugis ini bertujuan untuk memusatkan populasi dan memfasilitasi administrasi dan eksploitasi sumber daya pulau.

Pada tahun 1553, rakyat Negeri Haruku memilih Hatubesi Rijaukota sebagai raja mereka, yang memerintah hingga tahun 1580. Enam aman (desa) yang semula berjumlah enam berkembang menjadi lima soa (desa): Soa Raja, Soa Moni, Soa Lesirohi, Soa Suneth, dan Soa Rumalesi. Kekuasaan raja kemudian berpindah ke Tunisaha Rijaukota, yang kemudian dilanjutkan oleh Ferdinandus, yang keturunannya terus memerintah hingga saat ini.

Pada abad ke-17, sejarah Pulau Haruku berubah seiring dengan masuknya Belanda ke Tanah Maluku yang dikenal dengan sebutan Pulau Angkasa atau Moluccas. Saat Belanda memasuki Pulau Haruku, terjadi perang antara Belanda dan Portugis. Perang ini dimenangkan oleh Belanda dan Benteng Selandia dihancurkan. Belanda kemudian membangun kembali benteng tersebut dan menamainya "New Zelandia". Penduduk Haruku bersikap netral terhadap Portugis dan Belanda.





Pada tahun 1800-an, gubernur Belanda memanggil raja-raja di Kepulauan Lease-Saparua, Haruku, dan Nusalaut. Raja Nolothe dari Saparua yang sedang berlayar menuju Tanjung Totu di Haruku terpaksa berlabuh karena badai. Jangkarnya patah, dan dia meminta bantuan. Raja Markus Rijaluang (Rizaluang) dari Saparua mencari bantuan, tetapi Raja Haruku tidak ada di tempat. Sebaliknya, ia bertemu dengan putri Raja Haruku, Aihua Pareta (Helena). Raja Nolothe jatuh cinta padanya dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Ambon.

Kedua raja bertemu di Ambon. Dalam perjalanan pulang, Raja Nolothe singgah di Haruku untuk mengembalikan jangkar. Dia kemudian secara resmi melamar Aihua Pareta melalui ayahnya, Raja Haruku, dan dia menerimanya. Rakyat dan para pemimpin adat dari Nolothe dan Haruku menyetujui pernikahan tersebut. Ketika Raja Nolothe berlayar ke Haruku untuk pernikahan, Aihua Pareta tiba-tiba meninggal. Raja Haruku mengirim Marinyo ke Wai Maru untuk mencegat Raja Nolothe dan menyampaikan berita tragis tersebut. Meskipun Aihua Pareta telah meninggal, Raja Nolothe bersikeras untuk tetap melangsungkan pernikahan. Dia melanjutkan perjalanan ke kediaman Raja Haruku, di mana, pada pukul 10 malam, kedua raja, melalui seorang pendeta Belanda, bertukar cincin antara Raja Nolothe dan mayat Aihua Pareta, dengan demikian menetapkan pela kawin (ikatan pernikahan) antara orang-orang Haruku dan Nolothe.

Pada tahun 1950-an, setelah kemerdekaan Indonesia, gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) mencapai Haruku. Banyak penduduk yang melarikan diri ke hutan-hutan di pulau ini. Tsunami menghantam Haruku pada tahun 1952, namun jumlah korban jiwa relatif rendah karena penduduk mengungsi ke hutan-hutan. Pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Desa No. 5 tahun 1979, mengganti sistem pemerintahan adat Haruku dengan struktur "desa administratif". Hal ini melemahkan adat dan tradisi lokal. Sistem ini tetap berlaku hingga awal tahun 2000-an, ketika kebijakan otonomi daerah mengizinkan desa untuk kembali ke struktur pemerintahan aslinya. Haruku kembali ke sistem tradisional Negeri Haruku, yang masih berlaku hingga saat ini.

Apa yang Kami Maksud dengan Pembangunan?

Hak Kami atas Pembangunan

Kami menjunjung tinggi hak atas pembangunan dengan memastikan keterlibatan masyarakat secara langsung dalam membentuk masa depan mereka. Hal ini dicapai melalui berbagai metode partisipatif, termasuk:

- Diskusi Kelompok Terarah (FGD);
- Mengumpulkan pengetahuan dan narasi tradisional;
- Survei masyarakat; dan
- Wawancara dengan kaum muda, perempuan, orang tua, dan penyandang disabilitas.

Kami berusaha membangun kepercayaan di antara Masyarakat Adat dan, karena anggota tim kami adalah bagian dari komunitas Haruku, kami merasa sangat terbantu.

Prinsip-Prinsip Praktik Masyarakat Kami

Negeri Haruku masih menerapkan prinsip-prinsip kearifan lokal, dan salah satu yang paling terkenal adalah Sasi. Sasi adalah aturan pengelolaan wilayah adat yang diatur oleh kewang (polisi adat) dalam mengelola wilayah dan sumber daya alam. Sistem aturan sasi di bawah kewang terdiri dari dua bagian besar, yaitu:

1 Sasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

- Sasi Laut: Mengatur pemanfaatan sumber daya di laut.
- Sasi Kali: Mengatur pemanfaatan sungai dan cara menggunakan sumber daya sungai, seperti ikan, pasir, batu, perilaku mandi, mencuci, baju, dll.
- Sasi Hutan: Mengatur penggunaan sumber daya hutan dan cara pengambilannya.

2 Sasi Dalam Negeri

Dikenal sebagai sasi dalam negeri yang bertujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan pola hubungan antar masyarakat di dalam negeri (desa).

Prioritas Pengembangan Masyarakat Kami

Tantangan Utama yang Kami Hadapi dan Prioritas Masalah yang Perlu Diatasi

Tantangan utama kami adalah cuaca, yang mengharuskan kami untuk beradaptasi dan memaksimalkan waktu yang tersedia. Kami juga menyesuaikan diri dengan jadwal pertemuan masyarakat, dengan tetap menghormati kegiatan harian mereka. Selain itu, kami tetap bersikap netral terhadap konflik internal, seperti konflik antara tetua adat dan pemerintah. Kami membiarkan mereka menyelesaikan masalah ini secara mandiri, sebuah proses yang dapat memakan waktu karena kami menunggu konsensus antara kedua belah pihak.

Selama wawancara, beberapa peserta mengungkapkan kekhawatiran mereka untuk berbagi pendapat, karena takut akan dampak yang mungkin terjadi. Kami meyakinkan mereka akan kerahasiaan sepenuhnya, yang mendorong mereka untuk berbicara secara terbuka.



AMAN Maluku memfasilitasi pertemuan komunitas untuk mengenali dan memahami perspektif serta pendapat anggota komunitas mengenai isu-isu yang mereka hadapi. (Foto oleh AMAN Maluku)

Visi Pengembangan Kami

Kami melanjutkan prioritas masyarakat yang sudah ada untuk memperkuat ketahanan pangan, karena Masyarakat Haruku menghadapi banjir tahunan dan bencana lainnya. Arah ini diinformasikan melalui diskusi dan survei komprehensif yang mengumpulkan pendapat dan masukan dari semua pemangku kepentingan. Rencana kami secara khusus mencakup:

1. Mengembangkan peraturan negara untuk pengelolaan wilayah adat yang akan menindaklanjuti peta wilayah adat yang sudah ada dan memperkuat posisi Masyarakat Adat Haruku dalam mengelola tanah adat mereka.
2. Berkoordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan untuk melaksanakan program lumbung pangan sementara di Masyarakat Adat Haruku.
3. Meningkatkan kemampuan pemuda adat melalui pelatihan adaptasi dan mitigasi bencana.
4. Berkonsultasi dengan Pemerintah Negeri Haruku untuk menyampaikan perkembangan terkini dan menerima umpan balik.
5. Melibatkan lembaga-lembaga adat, khususnya Kewang Haruku, yang telah berperan penting dalam upaya perlindungan lingkungan.

Persatuan dan keyakinan masyarakat terhadap penentuan nasib sendiri oleh masyarakat adat merupakan kunci untuk mencapai pembangunan yang menghormati dan mencerminkan kearifan lokal dalam segala bentuknya.

Partisipasi Masyarakat dalam Merancang dan Melaksanakan Rencana Pembangunan

Peran dan Partisipasi Kami dalam Menyusun Rencana Pembangunan yang Dipimpin oleh Masyarakat

Peran kami sebagai tim dalam mempersiapkan rencana tersebut adalah memfasilitasi diskusi, memberikan ruang bagi masyarakat untuk memberikan pendapat, dan mendengarkan dengan seksama apa yang mereka inginkan. Skenario yang kami siapkan melibatkan semua pemangku kepentingan - pemuda, perempuan, tetua adat, dan penyandang disabilitas - untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi mereka untuk komunitas mereka. Hal ini termasuk:

- Kami melakukan wawancara dengan: 5 orang pemuda, 10 orang perempuan adat, 2 orang tetua adat, dan 5 orang penyandang disabilitas.
- Survei juga dilakukan dengan: 10 perempuan adat, 5 laki-laki, 2 perempuan muda, dan 3 laki-laki muda.



Pertemuan komunitas bersama perempuan adat. (Foto oleh AMAN Maluku)

Proses Konsultasi dan Pemberian Persetujuan yang Berkelanjutan di Komunitas Kami

Kami memprioritaskan konsultasi dan persetujuan dari masyarakat. Semua hal yang direncanakan harus didiskusikan bersama sehingga semua pihak memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab atas apa yang dibuat. Kami secara konsisten meminta masukan dari mereka, dengan menyadari bahwa pada akhirnya mereka yang akan menerapkan dan merasakan dampak dari setiap inisiatif.

Apa yang Kami Minta

1

Kami menyerukan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun peraturan negara tentang pengelolaan wilayah adat yang akan menindaklanjuti pengakuan penuh atas peta wilayah adat yang sudah ada milik masyarakat adat dan memperkuat posisi Masyarakat Adat Haruku dalam mengelola wilayah adatnya.

2

Kami menghimbau Kementerian Pertanian dan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi Maluku dan juga Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Maluku Tengah, untuk mendukung pelaksanaan program lumbung pangan di Negeri Haruku.

3

Kami menyerukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Provinsi Maluku dan Kabupaten Maluku Tengah untuk meningkatkan kapasitas pemuda adat melalui pelatihan adaptasi dan mitigasi bencana untuk memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi tantangan lingkungan dan iklim.

4

Kami menyerukan kepada Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku untuk secara teratur berkonsultasi dengan Pemerintah Negeri Haruku untuk menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kebijakan-kebijakan utama dan menerima umpan balik yang berarti dari masyarakat adat.

5

Kami menyerukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan, bekerja sama dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku, untuk melibatkan lembaga-lembaga adat, khususnya Kewang Haruku dan Kewang lainnya, untuk mengakui peran penting mereka dalam perlindungan lingkungan hidup dan memastikan kepemimpinan mereka dalam upaya-upaya konservasi.

Solusi yang dirancang bersama untuk dan oleh
Komunitas Haruku, Maluku, Indonesia

GLOBAL ADVOCACY TEAM



INTERNATIONAL
ACCOUNTABILITYPROJECT